

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Perbandingan Penerapan *Clean Government* Antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan aspek transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, ditandai dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi-informasi tentang program dan kinerja pemerintahan yang ada di kedua daerah dan di kedua dinas tersebut.
2. Perbandingan aspek akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, ditandai dengan kinerja para aparatur dinas yang mulai sadar akan segala sesuatu yang sudah seharusnya dipertanggungjawabkan terlaksana dengan baik dari segi proses pembuatan program hingga evaluasi yang diberitahukan kepada public.
3. Perbandingan dalam aspek partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama tinggi tingkat kesadaran masyarakatnya. Masyarakat melalui pemilu untuk

menentukan kandidat pilihan mereka untuk memimpin daerah dan tidak segan melaporkan segala kejanggalan yang terjadi, pemerintah daerah juga memfasilitasi aduan masyarakat dengan membuat aplikasi atau website bilik aduan.

4. Perbandingan dalam aspek supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya penegakan hukum. Namun setelah terjadinya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK memberikan dampak yang cukup baik bagi aparatur di kedua daerah untuk saat ini. Ditandai dengan capaian-capaian yang diraih oleh aparatur di kedua dinas untuk menarik Kembali simpati dan kepercayaan masyarakat melalui program-program pemerintah dan dinas yang baru.

## **5.2 Saran**

Untuk menciptakan *clean government* (pemerintahan yang bersih dan transparan) di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, serta memastikan kelanjutan upaya positif dalam pembangunan daerah, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan sangat penting. Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memastikan bahwa informasi terkait anggaran, pengeluaran, serta kebijakan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mekanisme akuntabilitas juga harus diperkuat, dimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik menjadi hal yang

tak terelakkan.

2. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal dengan meningkatkan fungsi pengawasan baik dari internal pemerintah daerah maupun dari pihak-pihak independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat sipil. Sistem pengawasan yang efektif akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika oleh pihak-pihak yang berwenang di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Penerapan E-Government dengan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan dapat membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan suap. E-Government dapat meminimalkan interaksi langsung dengan birokrasi dan mempercepat proses layanan publik, mengurangi ruang untuk praktik-praktik korupsi di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Pelatihan Etika dan Integritas dengan mengedepankan pelatihan etika dan integritas bagi para pegawai Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta calon-calon pemimpin daerah sangat penting. Kesadaran akan prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas publik akan membantu menghindari konflik kepentingan dan upaya korupsi.
5. Masyarakat di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat harus diajak untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi pemerintah daerah. Program-

program partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana publik, proyek-proyek pembangunan, dan tata kelola pemerintahan dapat membantu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi.

6. Melindungi *whistleblower* atau pihak yang melaporkan praktik-praktik korupsi atau penyimpangan dalam pemerintahan Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah langkah penting. Mekanisme perlindungan ini akan memberikan jaminan bagi mereka yang memiliki informasi penting untuk melaporkan pelanggaran, tanpa harus merasa khawatir akan balasan atau ancaman.
7. Membangun sistem pengaduan publik yang efektif dan mudah diakses akan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran atau praktik korupsi. Mekanisme ini harus diikuti dengan tindakan tegas dan cepat dalam menangani pengaduan yang masuk di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Melakukan kampanye edukasi anti-korupsi di sekolah-sekolah dan masyarakat secara umum akan membentuk kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi. Menciptakan budaya yang menolak korupsi akan membantu membangun *clean government* di Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

